

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia sejak reformasi keuangan yang terjadi hingga saat ini harus memenuhi tuntutan pengelolaan keuangan negara yang baik (*good governance*) dan sesuai dengan tuntutan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah merupakan prinsip yang menyerahkan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengelola dan menangani urusan pemerintahan serta keperluan masyarakat dalam susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap daerah otonom diwajibkan merancang laporan keuangan yang diperlukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap dana keuangan yang diperolehnya, baik itu berasal dari pusat maupun daerah. Pemerintah daerah tidak bisa lagi menyembunyikan situasi keuangan dari masyarakat karena reformasi dalam pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk menerapkan pemerintahan yang baik.

Sejalan dengan berlakunya peraturan pemerintah daerah tentang Pemerintahan Daerah, terdapat keinginan di kalangan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di dalam badan-badan pemerintahan daerah. Pada saat yang sama, ada harapan yang semakin besar dari masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik. Salah satu langkah utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Guasmin & Febrianti, 2019). Tujuan dari akuntabilitas ini mencakup laporan keuangan dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang penting. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran oleh entitas pemerintah (Fauziyah & Handayani, 2017).

Pemerintah berupaya untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan menyampaikan laporan yang memenuhi standar tepat waktu dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang diterima umum. Suatu penyajian laporan keuangan yang utuh dalam laporan keuangan akan menjamin akuntabilitas publik yang baik. Pelaporan keuangan pemerintah harus

didukung oleh bukti-bukti administrasi yang dapat diterima oleh kepercayaan publik terhadap transparansi pelaporan. Untuk mencapai hal ini, diperlukan kemampuan pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan dengan cara yang relevan, jujur, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan, serta mempublikasikan kepada publik (Fauziyah & Handayani, 2017).

Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan. Dalam hal ini, aksesibilitas laporan keuangan juga memiliki keterkaitan didalamnya, akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam hal ini laporan yang mengandung informasi yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, dan laporan keuangan yang secara langsung tersedia dan mudah diakses. Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan akses yang mudah bagi pemakai laporan keuangan, tidak hanya terbatas pada Lembaga Legislatif dan Badan Pengawas, melainkan juga untuk masyarakat yang telah menyerahkan keyakinan kepada pemerintah daerah dalam menangani keuangan publik (Antika et al., 2020).

Pemerintah mengamanatkan pengendalian internal yang dilakukan di seluruh lingkungan pemerintahan, untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan laporan keuangan yang berkelanjutan dan mencegah manipulasi laporan keuangan dalam jangka waktu yang lama. Tujuan ini mendorong dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 bertujuan untuk membangun sistem pengendalian pemerintah yang mampu mengimplementasikan praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang baik *good governance* (Antika et al., 2020). Sistem pengendalian internal pemerintah yaitu sistem pemantauan intern yang dilaksanakan oleh semua pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Antika et al., 2020).

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 yang menyebutkan secara tegas bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan standar yang harus diikuti dalam laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan

pemerintah daerah (Zeyn, 2011). Adanya standar dalam pelaporan keuangan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah sehingga lebih terukur, terstruktur dan dapat dibandingkan, sesuai dengan indikator yang digunakan dalam pelaksanaan *good governance*. (Ramdani & Agustina, 2019).

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, upaya pemerintah dalam mengatur pengelolaan keuangan sudah dilaksanakan dengan baik, namun hal tersebut belum dapat dilakukan oleh pemerintah dengan sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Saat dilakukan interogasi evaluasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Badan pemeriksa Keuangan (BPK) masih menjumpai beberapa problem atas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Wilayah Karesidenan Besuki atau wilayah tapal kuda yaitu wilayah administratif jawa timur bagian timur dengan pembagian: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Jember.

Pembentukan opini BPK atas pelaporan keuangan selama 10 tahun terakhir yang berada di Eks-Karesidenan Besuki mendapatkan beberapa opini yang berbeda-beda dari BPK yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Pembentukan Opini BPK (Sumber : *jatim.go.id*)

Kabupaten	Tahun									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Banyuwangi	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Bondowoso	WTP-DPP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Situbondo	WDP	WDP	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Jember	WTP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WDP	Disclaimer	Tidak wajar	WDP

Berdasarkan pembentukan opini terhadap empat kabupaten di wilayah Eks-karesidenan Besuki selama 10 tahun terakhir, dapat dirangkum bahwa pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember masih jauh dari optimal jika

dibandingkan dengan kabupaten lain. Pada tahun 2020 mendapat Opini Tidak Wajar karena pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jember yang kurang baik, hal ini dikarenakan terdapat anggaran dana covid yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar 107 miliar, selain itu BPK juga menemukan beberapa persoalan antara lain kelebihan honor tim pelaksana pekerjaan, pemborosan keuangan daerah dan lain sebagainya (jatim.bpk.go.id). BPK menyampaikan pendapatnya karena adanya beberapa kekurangan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember. Kekurangan tersebut meliputi penyimpangan dari standar akuntansi pemerintahan dalam penyajian laporan keuangan, ketidakcukupan sistem informasi akuntansi dan pelaporan, serta kelemahan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

Selain adanya *fenomena gap* pada Pemerintah Kabupaten Jember, penelitian ini juga dilakukan karena adanya *research gap* pada penelitian-penelitian terdahulu. Hasil penelitian Guasmin & Febrianti (2019) membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun berbeda dengan penelitian Azizah et al (2015) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sedangkan SPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian melihat dari penelitian sebelumnya, Ichlas et al (2014) menemukan bahwa penerapan standar akuntansi, sistem pengendalian intern pemerintah, dan aksesibilitas keuangan secara bersama sama berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Oktaviani & Sari (2020) menemukan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

Penelitian sebelumnya ditemukan bahwa terdapat ketidak konsistenan masalah penelitian sebelumnya mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal pemerintah, dan penerapan SAP terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, belum ada penelitian yang meneliti keempat variabel ini secara bersama-

sama terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Oleh karena itu penyusun melakukan penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian, diantaranya

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
3. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
4. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
5. Apakah penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian yang telah diidentifikasi, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan, yang berfungsi sebagai titik fokus penelitian:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
5. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan akan sistem pengelolaan keuangan daerah terutama yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan penerapan standar akuntansi pemerintah serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

##### **2. Bagi Pembaca**

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk meningkatkan Tingkat pengetahuan bagi peneliti lain dan pembaca. Selain, itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai data sekunder bagi penelitian selanjutnya apabila akan melanjutkan penelitian ini atau dengan topik yang berkaitan.

##### **3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam hal penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintah dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.